



BUPATI BALANGAN GELDIZERI (PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DESCRIPTION PERATURAN BUPATI BALANGAN GIRLSKAND DEGS SASI NOMOR 25 TAHUN 2016

(4) Pengukuran dan pemband LENLVIC rja

lambat tanggal 10 sei mejajin Kebaja Bas SANTUNAN KEMATIAN Spinbajan Bajankan bajing

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA triwulanan) dan Tahunan

secara perkala (nab maupati Balangan,

- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat Menimbang : a. bahwa dalam rangka membanga mengalami peristiwa biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian, perlu adanya santunan kematian kepada

 kahli waris;
 - bahwa Pemerintah Daerah akan memberikan santunan kematian kepada ahli waris yang melaporkan peristiwa kematian keluarganya, sehingga partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian penduduk semakin meningkat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana perubahan Gree dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Santunan Kematian; disesuaikan dalam b
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bumbu Tanah Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik b mbman 2KbD Indonesia Nomor 4265); Kebaga paban mejajai kebaja (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditandatangani
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pagara Igak e Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran (2) Louis Keucsu Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN

BUPATI TENTANG

SANTUNAN

KEMATIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
- 3. Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- 5. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Balangan yang telah memenuhi ketentuan administrasi kependudukan.
- 6. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tertinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil / Instansi berwenang.
- 7. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertangung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
- 8. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab keluarga.

the k

- 9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas CAtatan Sipil Kabupaten Balangan dan atau instansi berwenang.
- 10. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Balangan, yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

Tujuan pemberian santunan kematian adalah:

- 1. Meringankan beban ahli waris/keluarga atas beban biaya terkait dengan kepentingan almarhum/almarhumah;
- 2. Meningkatkan partisipasi ahli waris/keluarga/masyarakat dalam melaporkan terjadinya peristiwa kematian.

BAB III PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa santunan kematian atas terjadinya peristiwa kematian warga yang miskin dan terdaftar sebagai penduduk secara sah.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris/keluarganya.
- (3) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka meringankan beban ahli waris/keluarga atas biaya penguburan dan biaya lainnya yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/almarhumah.

Pasal 4

Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan atas peristiwa kematian yang terjadi pada :

- a. warga yang memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Balangan;
- b. warga yang belum dewasa yang orang tua/walinya ber KTP Balangan dan yang bersangkutan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- c. bayi baru lahir atau anak-anak yang orang tuanya memiliki KTP/Kartu Keluarga Balangan.

Pasal 5

(1) Besarnya santunan kematian adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiwa.



- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut :
 - a. permohonan tertulis dari ahli waris/keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau permohonan dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - d. fotocofy akta Kematian (serta menunjukkan akta kematian yang asli).
- (3) Permohonan santunan kematian disampaikan dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
- (4) Penyaluran/penyerahan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi oleh Kecamatan dan mendapat persetujuan oleh Bupati melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Bantuan santunan kematian dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan santunan kematian dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial.
- (3) Bantuan santunan kematian termasuk dalam bantuan sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung diserahkan oleh bendahara bantuan kepada pemohon (ahli waris/keluarga) melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (2) Penyaluran dana santunan kematian kepada penerima santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang santunan kematian.
- (3) Kuitansi bukti penerimaan uang santunan kematian ditandatangani oleh pemohon (ahli waris/keluarga).

Pasal 8

- (1) Bendahara bantuan membuat rekapitulasi daftar nama almarhum/almarhumah dan penerima santunan kematian (ahli waris/keluarga) beserta alamatnya setiap bulan.
- (2) Bendahara bantuan menyampaikan rekafitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Am k

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Terhadap Almarhum/almarhumah yang tidak memiliki ahli waris/keluarga, maka uang santunan kematian diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Dalam hal santunan kematian diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah, wajib disertai dengan surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah bahwa almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris.
- (3) Kepala Desa/Lurah wajib menggunakan uang santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pengurusan dan pemakaman almarhum/almarhumah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal 1 September 2016

BUPATI BALANGAN,

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin pada tanggal September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

H. RUSKARIÁDI

for E

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

terpisahkan dalam Peraturan **Lasaj 3** ini

- (1) Terhadap Almarhum/almarhumah (yang sa tidak memiliki ahli waris/keluarga, maka uang santunan kematian diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Dalam hal santunan kematian diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah, wajib disertai dengan surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah bahwa almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris.
- (3) Kepala Desa/Lurah wajib menggunakan uang santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pengurusan dan pemakaman almarhum/almarhumah.

Rencana Pemban **KELENLAN BENALA** Daerah (RPJMD); **BYB A**

(2) Dalam penyusunan dokume basaj 10 ian Kinerja sebagaimana dimaksud

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

paratur Negara dan Birokrasi Religio S Julan setelah dokumen anggaran di sa kan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal 1 September 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin pada tanggal September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

ttd

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

H. RUSKARIADI Perjanjian Kinerja sebagai